

Pemetaan Partisipatif dan Pengorganisasian Masyarakat Marginal dalam Reforma Agraria Perkotaan

Nafisah Pradana¹, Moh. Ansori²

^{1,2} Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: nafisap1806@gmail.com, m.anshori@uinsa.ac.id

Abstract:

Urban agrarian reform faces serious challenges due to development pressures and unequal control over urban space, which disproportionately affect marginalized communities. Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 in Surabaya is a densely populated settlement experiencing land tenure insecurity and vulnerability to eviction. This community service activity aims to enhance critical awareness and strengthen community solidarity in addressing urban agrarian issues through participatory mapping and community organizing. The method employed is Participatory Action Research (PAR), consisting of stages of observation, participatory problem identification, community based participatory mapping, collective reflection, and joint action planning. The results indicate that participatory mapping not only produces spatial maps and data of the settlement, but also serves as a collective learning process that shifts residents' perspectives from being policy objects to becoming subjects who are aware of their rights to living space. This process increases residents' awareness of their spatial conditions, strengthens community solidarity, and builds a social data foundation for advocacy. Therefore, participatory mapping has proven effective in empowering marginalized urban communities.

Keywords: urban agrarian reform, participatory mapping, PAR

Abstrak:

Reforma agraria perkotaan menghadapi tantangan serius akibat tekanan pembangunan dan ketimpangan penguasaan ruang yang berdampak pada masyarakat marginal. Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 di Kota Surabaya merupakan kawasan permukiman padat yang mengalami ketidakpastian status lahan serta kerentanan terhadap penggusuran. Kegiatan pengabdian memiliki dampak peningkatkan kesadaran kritis dan memperkuat solidaritas masyarakat dalam menghadapi persoalan agraria perkotaan melalui pemetaan partisipatif dan pengorganisasian warga. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan tahapan observasi, identifikasi masalah secara partisipatif, pemetaan partisipatif kampung, refleksi kolektif, serta perencanaan aksi bersama. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif tidak hanya menghasilkan peta dan data spasial kampung, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kolektif yang mendorong perubahan perspektif warga dari objek kebijakan menjadi subjek yang sadar akan hak ruang hidup. Proses ini meningkatkan kesadaran warga terhadap kondisi ruang yang mereka tinggali, memperkuat solidaritas komunitas, serta membangun basis data sosial sebagai alat advokasi. Dengan demikian, pemetaan partisipatif terbukti efektif dalam pemberdayaan masyarakat marginal perkotaan.

Kata kunci: reforma agraria perkotaan, pemetaan partisipatif, PAR



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Reforma agraria perkotaan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya tekanan pembangunan, komersialisasi ruang, dan marginalisasi kelompok berpendapatan rendah. Pada konteks ini, masyarakat yang tinggal di kawasan rentan perkotaan seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk mempertahankan ruang hidupnya. Karena itu, pemetaan partisipatif berbasis pengorganisasian masyarakat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas kolektif warga. Melalui proses pengumpulan informasi, pengenalan aset, dan pemataan masalah bersama-sama, warga tidak hanya memperoleh gambaran objektif tentang kondisi ruang mereka, tetapi juga mengembangkan solidaritas dan kesadaran kritis terhadap relasi kuasa yang mempengaruhi akses tanah dan ruang. Dengan demikian, pemetaan partisipatif bukan sekadar alat teknis, melainkan praktik pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam agenda reforma agraria perkotaan.

Dalam konteks Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11, kondisi masyarakat yang rentan masyarakat marginal secara ekonomi, sosial, dan ruang memperlihatkan kebutuhan mendesak terhadap model pengorganisasian yang dapat memperkuat posisi mereka dalam mempertahankan hak atas tanah serta memperoleh akses terhadap ruang hidup yang layak. Masyarakat marginal lebih sulit dan rumit permasalahanya daripada masyarakat desa (Toding & Harisantoso, 2023). Marginalisasi dihubungkan dengan penyingkirkan sosial akibat tidak seimbangnya dalam program pembangunan dan pendidikan yang belum merata (Asyifani et al., 2021). Krisis tempat tinggal bukan sekadar soal fisik bangunan, tetapi berkaitan erat dengan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang sangat timpang dan semakin dikendalikan oleh kekuatan pasar serta ekspansi kapital (Boediardjo & Suhartoko, 2023).

Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang memuat tempat atau wilayah yang ditinggali atau digunakan (Baharuddin et al., 2020). Dalam proses ini, mereka juga belajar memahami aspek hukum, kebijakan tata ruang, hingga mekanisme advokasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Pemetaan partisipatif memiliki manfaat pada masyarakat yaitu untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat perihal hak-hak atas tanah mereka dan sumber daya yang dimiliki. Pemetaan partisipatif merupakan pendekatan yang

melibatkan semua masyarakat setempat untuk mengidentifikasi dan memetakan sumberdaya yang mereka miliki (Ramezani, S, & Nooraie, 2023).

Peta dapat dimanfaatkan sebagai media alat tawar atau negosiasi dengan pihak lain yang berhubungan, karena dengan andanya peta dapat menjadi jelas kondisi wilayah tersebut sudah digunakan oleh masyarakat dan siapapun mempunyai hak menghuni wilayah. Proses melakukan pemetaan partisipatif dapat memunculkan semangat dalam menggali pengetahuan lokal, sejarah, sistem lembaga setempat, hukum setempat, analisis sumber daya alam yang dimiliki, dan lainnya (Baharuddin et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan (Surya Wira et al., 2024) menunjukkan bahwa reforma agraria di wilayah pedesaan berperan penting dalam meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat desa melalui redistribusi tanah, peningkatan kapasitas masyarakat, dan partisipatif aktif dalam kegiatan ekonomi. Pada penelitian yang dilakukan (Mahmuda et al., 2020) bertujuan mengembangkan strategi dalam pemberdayaan agar nilai kemandirian dapat diterapkan efektif dikomunitas muslim marginal, dampaknya lebih pada perubahan mindset dan penguatan moral ekonomi. Pada pengabdian kampung Putat Jaya Baru ini bertujuan membangun kesadaran kritis dan solidaritas kolektif warga dalam memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidup dengan melalui pemetaan partisipatif sebagai strategi advokasi agraria dalam memperjuangkan ruang hidup atas hak tanah.

Reforma Agraria perkotaan mempunyai tujuan dalam menyelamatkan dan membantu kampung di perkotaan dari kemusnahan yang dapat datang melalui manapun seperti penggusuran. Kampung Putat Jaya Baru menghadapi masalah agraria yang kompleks yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepastian hak atas tanah, di mana ruang hidup warga berada pada status lahan yang tidak jelas atau rentan terhadap klaim pihak lain, sehingga menempatkan mereka dalam posisi rawan penggusuran dan kehilangan tempat tinggal. Masyarakat marginal sangat merasakan dampaknya seperti buruh informal, pekerja harian, perempuan, dan anak-anak, yang menggantungkan kehidupan sosial dan ekonominya pada ruang kampung tersebut.

Persoalan agraria ini menguat seiring meningkatnya tekanan pembangunan perkotaan dan perubahan tata ruang kota semakin mempersempit ruang hidup masyarakat kampung. Masalah agraria tersebut terjadi karena lemahnya perlindungan hukum atas hak bermukim warga, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaan dan pengambilan kebijakan tata ruang. Dampak yang dirasakan melalui munculnya rasa ketidakpastian, kerentanan sosial dan ekonomi, konflik laten atas lahan yang mendorong masyarakat untuk mulai membangun kesadaran kolektif upaya pengorganisasian sebagai bentuk perjuangan mempertahankan hak atas ruang hidup mereka. Oleh karena itu masyarakat bukan hanya menerima informasi tetapi juga melatih warga dalam pengambilan Keputusan (Arisandi, 2021).

Berdasarkan persoalan agraria yang dihadapi masyarakat Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11, diperlukan adanya pengabdian masyarakat berbasis reforma agraria yang tidak hanya pada penyelesaian teknis pertanahan, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan kesadaran kolektif warga. Pengabdian ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat posisi masyarakat kampung yang rentan secara struktural akibat ketidakpastian hak atas tanah, lemahnya akses terhadap informasi hukum, serta terbatasnya ruang partisipasi dalam perencanaan pembangunan perkotaan. Sasaran utama pengabdian ini adalah masyarakat Kampung Putat Jaya Baru, khususnya kelompok masyarakat marginal yang paling terdampak oleh ancaman penggusuran dan ketimpangan penguasaan ruang hidup agar mampu memahami, memperjuangkan, dan mempertahankan hak-hak secara kolektif.

Pengabdian reforma agraria ini dilaksanakan melalui kolaborasi strategis dengan LBH Surabaya dan ARKOM Jawa Timur sebagai mitra pendamping yang memiliki pengalaman dalam advokasi hukum dan pendampingan komunitas berbasis ruang. Pendekatan yang digunakan adalah partisipatif dan berbasis pengorganisasian masyarakat, dengan menggunakan pemetaan partisipatif, pendidikan kritis reforma agraria, serta penguatan solidaritas warga sebagai strategi advokasi. Kontribusi utama dari pengabdian ini diharapkan mampu menghasilkan basis data spasial dan sosial yang dimiliki bersama oleh warga, meningkatkan kesadaran hukum dan reforma agraria, serta memperkuat posisi tawar Masyarakat Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 dalam memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah dan ruang hidup di tengah dinamika pembangunan perkotaan.

B. Metode Pengabdian

Pengabdian Kampung Putat Jaya Baru menggunakan pendekatan metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR yaitu pendekatan yang secara aktif semua pihak yang relevan (Stakeholder) dilibatkan pada saat mengkaji sebuah tindakan yang sedang dilakukan dalam melakukan tarsnformasi dan perbaikan yang lebih baik (Afandi, 2016). Metode PAR adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat

yang berdasar pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehingga membutuhkan sebuah perubahan secara partisipatif. Metode PAR mempunyai tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset, dan aksi (Afandi, 2014).

Subjek pengabdian terdiri atas warga kampung, tokoh masyarakat, serta kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan buruh harian. Lokasi penelitian berada di Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11, sebuah wilayah perkotaan yang dihuni oleh masyarakat marginal dengan kondisi sosial ekonomi yang rentan dan status kepemilikan lahan yang tidak pasti. Pengorganisasian pun melakukan pendekatan inkulturas, yaitu mengenali dan menghargai nilai-nilai lokal serta membangun relasi setara dengan warga. Pendekatan ini memungkinkan proses belajar bersama yang mendorong tumbuhnya kesadaran kritis warga atas situasi yang mereka hadapi.

Proses pengorganisasian ini adalah bagian upaya untuk memperkuat kapasitas yang dimiliki masyarakat Kampung Putat Jaya Baru RT 7 dalam perjuangan reforma agraria. Posuder penelitian yang dilakukan ada beberapa tahap yaitu pada tahap pertama mengidentifikasi masalah melalui *Preliminary Mapping* atau pemetaan awal, tahap kedua perencanaan aksi bersama warga melalui forum diskusi dan musyawarah kampung, tahap ketiga pelaksanaan kegiatan lapangan yaitu *Focuss Grup Discussion* (FGD), dan pemetaan partisipatif dalam membangun kesadaran kritis.

Pengabdian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara partisipatif yaitu dengan observasi digunakan untuk memahami aktivitas warga dan konsisi sosial kampung, FGD menjadi wadah diskusi antar warga dan peneliti untuk mevalidasi temuan lapangan, Sementara itu, penggunaan aplikasi QGIS digunakan dalam pemetaan spasial untuk mengvisualkan kondisi fisik wilayah, batas lahan, dan perubahan tata ruang. Analisis data penelitian ini menggunakan pohon masalah dan pohon harapan. Analisis pohon masalah membantu mempetakan sebab dan akibat dari persolan agrarian, sedangkan pohon harapan digunakan sebagai merumuskan cita-cita dan strategi perubahan yang telah disepakati warga. Hasil analisis kemudian refleksikan ke dalam forum partisipatif sehingga menghasilkan Kesimpulan yang aplikatif bagi Masyarakat Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 dalam memperjuangkan hak atas tanah dan memperkuat kemandirian Masyarakat.

Tahapan awal pengabdian dimulai dengan kegiatan observasi lapangan dan pemetaan awal untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, serta situasi agraria yang dihadapi warga. Melalui observasi dan dialog informal, tim pengabdian memperoleh data awal mengenai ketidakpastian status kepemilikan lahan, kepadatan permukiman,

serta kerentanan masyarakat terhadap tekanan pembangunan perkotaan. Tahap selanjutnya adalah proses pendidikan dan pendampingan partisipatif, di mana warga dilibatkan secara aktif dalam diskusi, forum kampung, dan pemetaan partisipatif. Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak merefleksikan pengalaman hidup mereka sendiri terkait hilangnya akses atas tanah dan dampaknya terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya kampung.

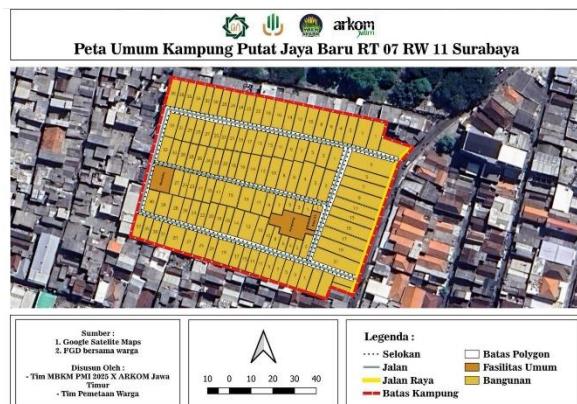
Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator dan pendamping yang membuka ruang dialog, menyediakan kerangka analisis, serta menghubungkan warga dengan pengetahuan teknis dan jaringan pendukung, seperti ARKOM Jawa Timur dan LBH Surabaya. Peran ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kapasitas warga, melainkan memperkuat kemampuan kolektif masyarakat dalam memahami persoalan agraria dan merumuskan langkah advokasi secara mandiri.

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dan penelitian di Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan warga sebagai subjek utama dalam keseluruhan proses.

1. Pemetaan Awal Issu Kondisi Realita Kampung

Kampung Putat Jaya merupakan salah satu marginal dan kampung padat penduduk di Kota Surabaya. Total penduduk Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 terdapat 167 KK.



Gambar 1. Peta Umum Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11

Peta umum Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 diatas menggambarkan kondisi spasial kampung sebagai kawasan permukiman padat di wilayah perkotaan Surabaya yang dihuni oleh masyarakat marginal dengan ketergantungan tinggi terhadap ruang hidup yang ada. Secara fisik, kampung ini tersusun atas rumah-rumah warga yang saling berhimpitan dengan jaringan gang sempit sebagai akses utama

mobilitas penduduk. Peta umum menunjukkan sebaran bangunan hunian, fasilitas umum seperti musholla dan pos RT, jaringan jalan lingkungan, serta ruang-ruang terbatas yang masih berfungsi sebagai area aktivitas sosial warga. Kepadatan hunian yang tinggi mencerminkan intensitas pemanfaatan lahan.

Pada awal tahun 1990 hingga 1995, wilayah yang kini dikenal sebagai Kampung Putat RT 7 RW 11 masih berupa lapangan luas dengan banyak pepohonan besar yang rindang. Di masa itu, terbangunnya rumah di kawasan ini dan awal mula terbentuknya pemukiman baru yang kemudian dikenal sebagai Kampung Putat Jaya Baru. Pada periode 1995 sampai 2005, masyarakat mulai berdatangan dan mendirikan rumah-rumah permanen. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kampung ini pun resmi terbentuk dengan adanya pelantikan Ketua RT pertama serta pembagian kavling rumah bagi warga yang tinggal. Jalanan kampung pun juga mulai dipaving, sehingga akses masyarakat menjadi lebih mudah.

Memasuki tahun 2005 hingga 2007, pembangunan fasilitas umum mulai dilakukan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Musholla didirikan sebagai sarana ibadah masyarakat sekitar, sementara pos RT dibangun untuk memperkuat kelembagaan kampung. Perkembangan kampung terus berlanjut dan berkembang pada periode 2016 hingga 2020 infrastruktur dasar semakin memadai dengan masuknya aliran listrik dan jaringan PDAM ke rumah-rumah warga. Kehadiran fasilitas tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, menandai semakin majunya Kampung Putat Jaya Baru sebagai lingkungan yang tertata dan layak huni.

Status kepemilikan tanah masyarakat yang tidak memiliki kepastian hak tanah seringkali berada pada posisi yang rentan, karena dapat terjadi penggususan dan kehilangan ruang hidup sewaktu-waktu. Kondisi tersebut dapat membawa langsung terhadap kerentanan sosial-ekonomi. Karena kesatuan hukum atas hak tanah merupakan sebuah yang jelas yang wajib ada dalam penggunaan lahan tanah tersebut (Ramadhani, 2021). Hilangnya lahan atau ruang huni bukan sekedar berdampak pada aspek secara fisik, melainkan pada akses ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang sudah tumbuh.

Hak untuk hidup dan juga untuk mendapatkan pekerjaan, ketika masyarakat dipindahkan, masyarakat belum tentu ada pekerjaan yang sama dan sesui dengan yang sebelumnya, masyarakat harus mengulang kembali dari awal ketika mereka harus pindah ke tempat yang baru. (Fahira & Fedryansyah, 2021). Mereka yang tergusur

harus menanggung biaya sosial yang tinggi, seperti meningkatnya pengangguran, menurunnya kualitas hidup, melemahnya solidaritas komunitas, hingga terbatasnya akses terhadap layanan publik.

2. Proses Identifikasi Masalah dan Perumusan Strategi Kolektif

Kampung Putat Jaya Baru merupakan salah satu wilayah di Surabaya yang mengalami dinamika pertanahan dan tekanan terhadap ruang hidup warga. Dalam konteks Reforma Agraria Perkotaan, kampung ini menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah belum terbentuknya kelompok warga yang solid dan terorganisir dalam memperjuangkan hak atas tanah dan tempat tinggal. Arkom Jatim dan LBH Surabaya menginisiasi strategi implementasi aksi kelompok Reforma Agraria Perkotaan di Kampung Putat Jaya Baru. Tujuan utama dari strategi ini adalah membangun dan memperkuat kesadaran kolektif warga dan juga sebagai wadah dalam melakukan reforma agraria.



Gambar 1. FGD bersama Warga

Berdasarkan diskusi partisipatif dengan warga menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 menghadapi berbagai permasalahan terkait lahan dan ruang hidup. Status kepemilikan tanah yang tidak jelas membuat warga berada dalam posisi rentan terhadap penggusuran. Konflik yang biasa terjadi di perkotaan pada umumnya karena masalah lahan, kepemilikan, dan luas bidang yang tersedia (Yuliantika, 2022). Selain itu, tekanan pembangunan kota mendorong meningkatnya harga tanah dan praktik komersialisasi ruang, sehingga semakin mempersempit akses masyarakat marginal terhadap ruang hunian yang layak. Kerentanan posisi tawar masyarakat perkotaan kerap dipicu oleh status kepemilikan lahan yang tidak pasti.

Masyarakat mulai memiliki kesadaran yang lebih kuat terhadap hak atas tanah yang mereka miliki bukan hanya sebagai hunian yang sudah diwariskan turun

menurun. Kesadaran kolektif hanya sementara masyarakat membutuhkan alat media dalam peahaman tersebut menjadi sebuah tindakan (Hasna, 2022). Masyarakat mulai peduli dan menjadi aksi kolektif bersama dalam menghadapi persoalan agraria seperti sengketa batas, klaim dari pihak luar, hingga ancaman alih fungsi lahan telah mendorong masyarakat untuk melihat tanah sebagai hak dasar yang harus diperjuangkan.

3. Pemetaan Partisipatif dalam Reforma Agraria Perkotaan

Pemetaan secara partisipatif merupakan salah satu langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah dan potensi lokal yang ada dalam kampung.



Gambar 2. Pembuatan Peta Putat Jaya Baru RT 7 RW 11

Pemetaan secara partisipatif ini tidak sekadar aktivitas teknis untuk menggambarkan sebuah wilayah, melainkan proses sosial yang melibatkan warga secara langsung dalam mengidentifikasi kondisi ruang hidup mereka. Pembangunan yang berorientasi lokal membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat (Hajar et al., 2024). Melalui pemetaan partisipatif warga diajak untuk bersama-sama mengenali batas wilayah, fungsi lahan, potensi, masalah, serta persoalan-persoalan yang dihadapi di lingkungan tempat tinggal mereka. Proses ini membuka ruang dialog antarwarga, membangun kesadaran kolektif, dan memperkuat hubungan sosial antar warga Kampung Putat Jaya Baru rt 7 RW 11.

Pemetaan dilakukan secara kolaboratif yaitu warga sendiri yang melakukan, terdapat 30 warga yang turut berpartisipasi dari semua kalangan tidak hanya pemangku kampung secara menyeluruh. Terdapat tiga gang dalam kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11, setiap gang diwakili paling tidak sepuluh orang dalam pemetaan partisipatif. Kemudian warga dibentuk 3 kelompok kecil setiap gang karena dengan cara ini dapat lebih intens dan lebih memahami kondisinya. Warga dengan menggambar peta berdasarkan sepengatahan dan pengalaman, Mengurutkan semua

lokasi rumah dan fasilitas umum, dan juga disertakan dengan data-data yang lain seperti letak penghijaun, aliran air, titik tempat sampah, jumlah jiwa dalam rumah dll.

Melalui proses pemetaan partisipatif warga tidak hanya menghasilkan peta sebagai produk visual, tetapi juga mengalami proses belajar kolektif yang menumbuhkan kepekaan terhadap ruang hidup yang mereka tempati. Warga mulai menyadari keterkaitan antara tata ruang kampung dengan persoalan lingkungan, kesehatan, dan kerentanan agraria yang mereka hadapi sehari-hari. Kesadaran ini mendorong warga untuk melihat ruang kampung bukan sekadar sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai ruang hidup bersama yang memiliki nilai sosial, ekologis, dan politis yang perlu dijaga dan diperjuangkan secara kolektif.

4. Transformasi Perspektif Warga sebagai Subjek Agraria

Pemetaan partisipatif juga menjadi alat advokasi yang sangat kuat. Hasil pemetaan dapat digunakan untuk menyusun dokumen legalitas, mendukung klaim atas tanah, dan menjadi dasar dalam menyusun rencana aksi atau mengajukan permohonan kepada pemerintah. Di sisi lain, pemetaan partisipatif dapat juga membuktikan bahwa warga memiliki kapasitas yang meningkat dalam mengelola wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan (Utami, 2021).



Gambar 3. Warga Mempresentasikan Hasil Peta

Proses pemetaan partisipatif ini membangkitkan rasa memiliki terhadap ruang hidup mereka. Warga juga berani dan mampu melakukan presentasi dan menceritakan kondisi kampung yang telah mereka tempati selama ini. Dengan adanya pemetaaan partisipatif ini warga sudah merasa memiliki tanggung jawab atas kampungnya, warga menjadi tau potensi dan masalah yang mereka hadapai sekarang, oleh karena itu pemetaaan partisipatif ini sangat penting digunakan alat sebagai perencanaan yang merumuskan dan strategi perubahan kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11. Hasil dari

rencana tata guna lahan yang telah dirumuskan dan disepakati dapat digunakan pemerintah dan masyarakat dalam mengatur penggunaan atau pemanfaatan tanah sebagai pembangunan sesuai dengan kondisi wilayahnya (Naf'an et al., 2024).



Gambar 4. Hasil Album Peta Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11

Hasil dari pemetaan partisipatif yaitu adanya album peta yang menjadi pegangan bersama bagi warga Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 dalam memahami, mengelola, dan merencanakan ruang hidup mereka secara kolektif. Peta yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kondisi fisik kampung, tetapi juga sebagai representasi pengetahuan lokal warga mengenai tata ruang, fungsi lahan, serta dinamika sosial yang berlangsung di dalam kampung. Melalui peta ini, warga memiliki acuan yang sama dalam melihat kampung sebagai satu kesatuan ruang hidup yang terorganisir, bukan sebagai permukiman informal yang tidak tertata. Informasi yang tersaji dalam peta seperti sebaran rumah, fasilitas umum, aliran air, ruang hijau, rumah sehat, dan titik-titik persoalan lingkungan menjadi dasar bagi warga dalam mengambil keputusan bersama terkait penataan kampung dan perbaikan kualitas lingkungan. Peta ini menjadi bukti konkret bahwa kampung dikelola secara aktif dan berkelanjutan oleh warganya, sehingga layak dipertahankan sebagai ruang hidup.

Kegiatan pengabdian Kampung Putat Jaya Baru RT 07 RW 11 menunjukkan bahwa dalam proses pemetaan partisipatif dapat menjadi sarana yang efektif dalam membangun kesadaran kritis dan solidaritas warga terhadap hak atas tanah dan ruang hidup. Upaya ini perlu dilanjutkan secara berkelanjutan dengan melalui program-program seperti pengembangan pelatihan lanjutan bagi warga terkait advokasi kebijakan tata ruang dan pengolaan lahan berbasis komunitas agar hasil pemetaan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah dan juga sebagai dasar penyusunan rencana tata guna lahan kampung yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

D. Kesimpulan

Kesimpulan Reforma menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif menjadi kunci dalam membangun kesadaran kritis masyarakat Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 terhadap posisi mereka dalam struktur reforma agraria perkotaan. Melalui keterlibatan langsung dalam proses pemetaan dan refleksi bersama, warga tidak lagi memandang diri mereka sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak atas tanah dan ruang hidup yang mereka tempati. Proses ini mendorong warga memahami pengorganisasian kolektif dalam menghadapi ketimpangan. Pemetaan partisipatif juga menunjukkan bahwa warga memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola serta mengatur kampung secara mandiri.

Selain meningkatkan kesadaran, pemetaan partisipatif juga sebagai penguatan solidaritas dan kebersamaan warga dalam memperjuangkan reforma agraria. Peta dan data yang dihasilkan menjadi simbol sekaligus alat perjuangan bersama yang memperkuat posisi tawar dalam menghadapi tekanan pembangunan perkotaan. Dengan demikian, pemetaan partisipatif tidak hanya menghasilkan proses teknis saja, tetapi juga membangun fondasi sosial bagi masyarakat Kampung Putat Jaya Baru RT 7 RW 11 dalam mengatasi persoalan agraria secara kolektif dan berkelanjutan.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis menyaampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Masyarakat Kampung Putat Jaya Baru RT 07 RW 11 yang sudah turut berpatisipasi dan memberikan dukungan dalam proses pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ARKOM Jatim yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, serta wawasan dalam proses pengorganisasian masyarakat dan pemetaan partisipatif. Ucapan terima kasih yang tulus turut disampaikan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya atas dukungan advokat dan pendampingan hukum yang diberikan dalam memperkuat hak-hak masyarakat. Tidak lupa, penulis juga berterima kasih kepada teman-teman MBKM UIN Sunan Ampel Surabaya yang sudah bekerja sama dan berkontribusi aktif dalam seluruh tahapan lapangan. Atas kerja sama dan dukungan semua pihak yang terkait, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan penelitian yang bermafaat bagi masyarakat.

Saran sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini, keberlanjutan program perlu dijaga melalui pendampingan berkelanjutan dan penguatan kelembagaan warga agar hasil pemetaan partisipatif dan pengorganisasian masyarakat tidak berhenti pada tahap ini tetapi terus digunakan sebagai dasar perencanaan dan advokasi kampung, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) lanjutan sangat dibutuhkan terutama dalam penguatan kapasitas advokasi warga, pengelolaan data spasial secara mandiri, serta pendampingan hukum dan kebijakan agar masyarakat mampu memperjuangkan hak atas tanah secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial Kritis*. : Uin Sunan Ampel Press.
- Afandi, A. (2016). *Modul Participatory Action Research (PAR): Untuk Pengorganisasian Masyarakat*. LPPM UIN Sunan Ampel.
- Arisandi, R. (2021). Peran Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kulo. *Osf*, 1–7.
- Asyifani, K., Alauddin, M. A., Herlina, H., & Purnamasari, K. (2021). Solidaritas Sosial dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi di Dusun Kentheng Kota Surakarta). *DIMENSI: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(1), 61–75. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41052>
- Baharuddin, Refki, A., & Fuady, A. (2020). Pemetaan Partisipatif Untuk Percepatan Pembangunan Desa Dan Kawasan Di Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. *AQUANA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 52–60.
- Boediardjo, V., & Suhartoko, Y. B. (2023). Analisis Prediksi Backlog Rumah Di Indonesia Periode 2022 - 2030. *Prosiding Working Papers Series In Management*, 15(1), 34–52. <https://doi.org/10.25170/wpm.v15i1.4541>
- Fahira, T., & Fedryansyah, M. (2021). Analisis Konflik Sengketa Lahan Di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 86. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31978>
- Hajar, S., Ramlan, & Saputra, A. (2024). Environmental governance in the development of tourist village based local wisdom. *E3S Web of Conferences*, 506, 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606008>
- Hasna, S. (2022). Tindakan Kolektif Masyarakat Jaringan Di Indonesia: Aktivisme Sosial Media Pada Aksi #Gejayanmemanggil. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 25–34. <https://doi.org/10.14710/interaksi.11.1.25-34>
- Mahmuda, M., Bukhari, D., Uin, F., & Padang, B. (2020). Dakwah pada Masyarakat Marginal Perkotaan (Studi Kasus Kota Padang). *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(2), 183–205.
- Naf'an, M., Yamin, A., & Dewi, G. (2024). Pembangunan Desa Melalui Penataan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa Menuju Desa Mandiri Sejahtera (Welfare Village) (Lokasi Kajian: Desa Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1315–1320. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3378>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40. <http://jurnal.bundamediagroup.co.id/index.php/sosek>
- Ramezani, S., & Nooraei, H. (2023). . A comparative study of participatory land-use

- planning and the theory of the right to the city. *GeoJournal*.
- Surya Wira, Arya Salman, Abimanyu Aziz, Rofi Wahanisa, & Muhammad Adymas. (2024). Reforma Agraria dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa. *Journal Customary Law*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3376>
- Toding, R. R., & Harisantoso, I. T. (2023). Memaknai Tanggung Jawab Gereja Terhadap Kaum Marginal Perkotaan Melaui Pemikiran Emmanuel Levinas. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 12(2), 255–270. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v12i2.177>
- Utami, W. (2021). Pemetaan Partisipatif Penyusunan Sistem Informasi Wisata. CARADDE *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 67–78. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde>
- Yuliantika, D. (2022). Alat Analisis Kronologi Konflik Dalam Penggusuran Lahan Pekayon-Jakasetia Sebagai Konflik Agraria. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.35990>